SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 285-290

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DINASTI ABBASIYAH: STUDI KASUS PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Ade Setiawan[1], Rizki Muhammad Fauzi[2], Hizqiel Nadjib Yasin[3], Rapi Badrun Munawar[4], Lina Marlina[5], Ana Fauziya Diyana[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
2410021111154@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Dinasti Abbasiyah; Kebijakan Ekonomi Islam; Baitul Mal; Sejarah Ekonomi Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi literatur dari sumber sejarah dan penelitian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Abbasiyah menerapkan kebijakan ekonomi strategis seperti penguatan jaringan perdagangan, perbaikan sistem perpajakan, pengelolaan *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan publik, serta pengembangan sektor pertanian dan industri. Kebijakan tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, pengawasan pasar, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Dinasti Abbasiyah menjadi landasan historis penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern.

Keywords: Abbasid Dynasty; Islamic Economic Policy; Baitul Mal; Economic History.

Abstract

This study aims to analyze the economic policies implemented during the Abbasid Dynasty and their contribution to the development of Islamic economic practices. The research uses a qualitative descriptive method with a historical approach through literature review of historical sources and relevant academic studies. The results indicate that the Abbasid government developed strategic economic policies such as strengthening trade networks, improving taxation systems, managing *Baitul Mal* as a public financial institution, and supporting agricultural and industrial productivity. These policies played an important role in promoting economic growth and strengthening Islamic economic principles such as justice, market supervision, and equitable wealth distribution. This study concludes that the economic policies of the Abbasid Dynasty provide an important historical foundation for the development of contemporary Islamic economic thought.

PENDAHULUAN

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) merupakan salah satu periode penting dalam sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ekonomi, perdagangan, dan administrasi negara. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam mencakup berbagai kawasan strategis yang menghubungkan jalur perdagangan antara Timur dan Barat. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor perdagangan internasional, pertanian, serta pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Abbasiyah berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1]

Perkembangan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Konsep-konsep seperti pengelolaan *Baitul Mal*, sistem perpajakan, pengawasan pasar melalui lembaga *hisbah*, serta dorongan terhadap aktivitas perdagangan menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada masa tersebut. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah diintegrasikan dalam pengelolaan ekonomi negara untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil.[2]

Selain itu, pada masa Abbasiyah juga berkembang berbagai pemikiran ekonomi yang lahir dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid memberikan kontribusi penting dalam merumuskan konsep ekonomi yang berkaitan dengan perpajakan, distribusi kekayaan, serta peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ekonomi pada masa itu, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan teori ekonomi Islam pada periode selanjutnya.[3]

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai sejarah ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, masih terdapat kesenjangan kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah Abbasiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam secara lebih komprehensif. Sebagian penelitian lebih menekankan pada aspek sejarah peradaban atau pemikiran ekonomi para tokoh, sementara analisis mengenai kebijakan ekonomi negara dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa tersebut berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam.[4]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah serta mengkaji perannya dalam perkembangan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber akademik yang relevan mengenai sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi pada masa Abbasiyah. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik kebijakan ekonomi

[1] Juwita Anjelina and Muhammad Adnan Azzaki, 'Kondisi Ekonomi Peradaban Islam Dari Perspektif Kebudayaan Dinasti Abbasiyah'.
[2] Universitas Islam and others, 'PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH'.
[3] Wafiyuddin Attaqy and others, 'DINAMIKA EKONOMI ISLAM PADA ERA ABBASIYAH DAN RELEVANSINYA PADA PEMBANGUNAN DI NUSANTARA', 3 (2025), pp. 72–78.
[4] Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, '1 , 2 1,2', 11.November (2025), pp. 115–32.

Dinasti Abbasiyah serta kontribusinya terhadap perkembangan konsep ekonomi Islam yang masih relevan untuk dikaji dalam konteks ekonomi modern.[5]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah melalui kajian terhadap berbagai sumber akademik yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah dan literatur yang membahas sejarah ekonomi Islam serta perkembangan kebijakan ekonomi pada masa tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen penelitian yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan sejarah Dinasti Abbasiyah. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan untuk memahami kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Dinasti Abbasiyah serta pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Islam.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi literatur yang bergantung pada ketersediaan sumber tertulis serta perbedaan interpretasi dalam beberapa kajian sejarah ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Negara pada Masa Dinasti Abbasiyah

Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah adalah pengelolaan keuangan negara yang terorganisasi dengan baik melalui sistem fiskal yang relatif stabil. Pemerintah Abbasiyah mengelola berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), serta pendapatan dari perdagangan dan hasil bumi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memungkinkan negara membiayai berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan sosial. Sistem fiskal ini juga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran negara sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga.[6]

Selain itu, kebijakan fiskal pada masa Abbasiyah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara dialokasikan untuk berbagai kepentingan publik seperti pembangunan irigasi, pengembangan sektor pertanian, serta pembiayaan lembaga pendidikan dan penelitian. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Abbasiyah memanfaatkan sistem fiskal sebagai alat pembangunan ekonomi sekaligus sebagai sarana pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat.[7]

Pengelolaan keuangan negara pada masa Abbasiyah juga ditopang oleh lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai pusat administrasi keuangan negara. Lembaga ini bertugas mengelola berbagai sumber pendapatan serta mendistribusikannya kepada sektor-

[5] Asas W A Tandhim, 'Peradaban Islam', 3 (2024), pp. 113–24.
[6] Ian Rakhmawan Suherli and others, 'Menelisik Kebijakan Fiskal Di Masa Kejayaan Islam : Studi Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah', 6 (2023), pp. 148–58.
[7] Umawiyah Di and Kerajaan Kecil, 'Analisis Komparasi Kebijakan Fiskal Masa Umawiyah , Abbasiyah ', 16.1 (2025), pp. 253–68.

sektor yang membutuhkan, seperti bantuan sosial, pembangunan fasilitas publik, serta pembiayaan pemerintahan. Keberadaan Baitul Mal menunjukkan bahwa sistem keuangan negara pada masa Abbasiyah telah memiliki struktur administrasi yang relatif maju dan sistematis dibandingkan dengan banyak pemerintahan pada masa yang sama.[8]

Perkembangan Perdagangan dan Aktivitas Ekonomi

Perkembangan perdagangan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kemajuan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang luas dan berada di jalur strategis perdagangan internasional menjadikan kota-kota seperti Baghdad sebagai pusat perdagangan dunia. Aktivitas perdagangan tidak hanya terjadi di dalam wilayah kekhalifahan, tetapi juga melibatkan berbagai wilayah lain seperti Asia Tengah, India, Cina, dan wilayah Mediterania. Kondisi ini menjadikan ekonomi Abbasiyah berkembang pesat karena adanya pertukaran barang, teknologi, serta pengetahuan antarwilayah.[9]

Selain perdagangan internasional, pemerintah Abbasiyah juga mendorong perkembangan sektor produksi seperti pertanian dan industri kerajinan. Pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan lahan pertanian memungkinkan peningkatan produktivitas hasil pertanian yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan industri seperti tekstil, logam, dan keramik turut memperkuat struktur ekonomi pada masa tersebut. Integrasi antara sektor perdagangan, pertanian, dan industri menjadikan perekonomian Abbasiyah memiliki struktur ekonomi yang relatif kuat dan beragam.[10]

Perkembangan aktivitas ekonomi tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi para pedagang dan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih luas. Stabilitas politik dan keamanan yang relatif terjaga pada periode awal Abbasiyah mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru serta meningkatnya mobilitas barang dan jasa antarwilayah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang mendukung aktivitas ekonomi memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi pada masa tersebut.[11]

Peran Lembaga Hisbah dan Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi

Salah satu karakteristik penting dari sistem ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah adalah adanya pengawasan pasar melalui lembaga hisbah. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Petugas hisbah atau muhtasib memiliki tugas untuk mengawasi praktik perdagangan di pasar, seperti memastikan kejujuran dalam timbangan, mencegah praktik penipuan, serta mengawasi kualitas barang yang diperjualbelikan. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa pemerintah Abbasiyah berupaya menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. [12]

Selain pengawasan pasar, penerapan prinsip keadilan juga terlihat dalam kebijakan distribusi kekayaan melalui instrumen zakat dan sedekah. Sistem redistribusi ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat serta membantu kelompok

[8] Iman Supratman and others, 'Penerapan Ilmu Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah Dalam Masa Kini', pp. 30–41.
[9] Umayyah Dan and others, 'Sistem Perekonomian Pada Masa Dinasti', 2 (2025), pp. 1–8.
[10] Ahmad Gurdachi and others, 'Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750- 804 M) Pendahuluan Sejarah Adalah Rekonstruksi Masa Lalu , Yaitu Merekonstruksi Apa Saja Yang Sudah Dipikirkan , Dikerjakan , Dikatakan , Dirasakan Dan Dialami Oleh Seseo', pp. 11–23, doi:10.24042/jhcc.v2i1.7759.
[11] Supratman and others.
[12] Islam and others.

masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya mekanisme distribusi tersebut, sistem ekonomi Abbasiyah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata.[13]

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan negara menunjukkan bahwa sistem ekonomi pada masa Abbasiyah tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari syariah. Hal ini menjadikan kebijakan ekonomi pada masa Abbasiyah memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi lain pada masa yang sama, karena menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. [14]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam. Pemerintah Abbasiyah menerapkan sistem pengelolaan keuangan negara yang terstruktur melalui sumber-sumber pendapatan seperti zakat, kharaj, dan jizyah yang dikelola melalui lembaga Baitul Mal. Sistem ini memungkinkan negara menjalankan berbagai fungsi ekonomi seperti pembiayaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan sosial sehingga tercipta stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kemajuan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah juga didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Letak geografis wilayah Abbasiyah yang strategis menjadikan aktivitas perdagangan internasional berkembang pesat dan menjadikan kota-kota besar seperti Baghdad sebagai pusat perdagangan dunia. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur serta pengelolaan sektor pertanian turut meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian negara.

Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, serta pengawasan pasar melalui lembaga hisbah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sistem distribusi kekayaan melalui zakat dan berbagai instrumen sosial juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial, sehingga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan konsep dan praktik ekonomi Islam hingga masa kini.

REFERENSI

Anjelina, Juwita, and Muhammad Adnan Azzaki, 'Kondisi Ekonomi Peradaban Islam Dari Perspektif Kebudayaan Dinasti Abbasiyah'

Attaqy, Wafiyuddin, Bisnis Syariah, Stei Hamfara, and Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, 'DINAMIKA EKONOMI ISLAM PADA ERA ABBASIYAH DAN RELEVANSINYA PADA PEMBANGUNAN DI NUSANTARA', 3 (2025), pp. 72–78

Dan, Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Nurul Fitriani Fatonah, and Siti Nurliah, 'Sistem Perekonomian Pada Masa Dinasti', 2 (2025), pp. 1–8

Di, Umawiyah, and Kerajaan Kecil, 'Analisis Komparasi Kebijakan Fiskal Masa Umawiyah ,

[13] Dan and others.
[14] Islam and others.

Abbasiyah ', 16.1 (2025), pp. 253–68

Gurdachi, Ahmad, Hasan Afabel, Fakultas Adab, U I N Sunan, and Abu Abdullah, 'Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750- 804 M) Pendahuluan Sejarah Adalah Rekonstruksi Masa Lalu , Yaitu Merekonstruksi Apa Saja Yang Sudah Dipikirkan , Dikerjakan , Dikatakan , Dirasakan Dan Dialami Oleh Seseo', pp. 11–23, doi:10.24042/jhcc.v2i1.7759

Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan, '1 , 2 1,2', 11.November (2025), pp. 115–32

Islam, Universitas, Negeri Alauddin, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, 'PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH'

Suherli, Ian Rakhmawan, Sofian Al-hakim, Elfan Fanhas, and Fatwa Khomaeny, 'Menelisik Kebijakan Fiskal Di Masa Kejayaan Islam : Studi Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah', 6 (2023), pp. 148–58

Supratman, Iman, Maudy Fathia, Aliyyu Aziiza Rochmana, Amelia Nur, and Najla Nur, 'Penerapan Ilmu Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah Dalam Masa Kini', pp. 30–41

Tandhim, Asas W A, 'Peradaban Islam', 3 (2024), pp. 113–24